

# IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA ORGANISASI MAHASISWA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA DEMI MEWUJUDKAN GOOD STUDENT GOVERNANCE

Muhammad Ridwan Siregar\*, Sendy Prasetya\*\*,  
Hermadi Prananto\*\*\*, Ester Yuniawati\*\*\*\*, dan Nian Undayani Sarsa\*\*\*\*\*

Peneliti Program Kreativitas Mahasiswa, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

## Abstract

*Many of our State's leaders come from Universitas Gadjah Mada. They inevitably came from student organizations, particularly executive organizations. In its development, said organizations are not executing its functions well, due to bad organization management. Indeed, to well execute said management, students need to implement good governance principles such as transparency, accountability, and participation. This research is hoped to be an ideal concept of good student governance for student organizations.*

**Keywords :** UGM Student Organizations, good governance, good student governance.

## Intisari

Banyak negarawan dan pemimpin negeri ini dididik di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM). Tidak bisa dipungkiri, mereka lahir tidak terlepas dari sebuah organisasi mahasiswa khususnya bidang eksekutif. Pada perkembangannya, organisasi mahasiswa di UGM tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan tidak diterapkannya tata kelola organisasi yang baik. Tentunya, untuk menerapkan hal tersebut organisasi mahasiswa haruslah paham dan sanggup untuk menjalankan beberapa prinsip yang ada di *good governance* yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi konsep yang ideal terkait *good student governance* pada organisasi mahasiswa.

**Kata Kunci:** organisasi mahasiswa UGM, *good governance*, *good student governance*.

## Pokok Muatan

A. Latar Belakang .....	57
B. Metode Penelitian .....	58
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	58
1. Peran Aktif Mahasiswa dalam Menjalankan Maupun Mengawasi Organisasi Mahasiswa di UGM .....	58
2. Organisasi Mahasiswa dalam Menjalankan Transparansi, Akuntabilitas dan Mengakomodir Partisipasi Mahasiswa serta Faktor Pendukung dan Penghambatnya .....	61
3. Konsep Good Student Governance yang Baik dan Ideal untuk dapat Diterapkan pada Organisasi Mahasiswa di UGM .....	65
D. Kesimpulan .....	68

\* Alamat korespondensi : muhridwansiregar@gmail.com.

\*\* Alamat korespondensi : sendyprasetya58@gmail.com.

\*\*\* Alamat korespondensi : retro\_mario@yahoo.com.

\*\*\*\* Alamat korespondensi : ester.yuniawati@gmail.com.

\*\*\*\*\* Alamat korespondensi : nian.undayani.s@gmail.com.

## A. Latar Belakang

Mahasiswa memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata kelola dan pembangunan potensi pemerintahan kemahasiswaan yang baik. Namun untuk mewujudkannya, diperlukan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Langkah utama mengawali suatu perubahan pada suatu tatanan kemahasiswaan adalah bagaimana mahasiswa yang tergabung dalam sebuah organisasi mahasiswa baik itu BEM, LEM, LM, maupun DEMA mengupayakan suatu tata kelola organisasi kemahasiswaannya secara baik dan ideal.

Sebagaimana diketahui, Universitas Gadjah Mada (UGM), di dalam sejarah kemahasiswaannya merupakan salah satu motor pergerakan mahasiswa Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif mahasiswa dan organisasi mahasiswa di UGM yang berfikir kritis dan idealis yang berkeinginan untuk menciptakan suatu negara yang adil dan makmur.

Dalam perkembangannya sekarang ini, organisasi mahasiswa di UGM khususnya bidang eksekutif yang dijalankan oleh mahasiswa Strata-1 dan Diploma, telah berkembang pesat dalam segi kuantitas yaitu berjumlah 20 (dua puluh) organisasi tingkat fakultas/sekolah vokasi maupun universitas. Akan tetapi, para organisasi mahasiswa tersebut dalam menjalankan tata kelola organisasinya terkadang masih tidak optimal. Sering terjadi ketidakjelasan dan kebingungan organisasi mahasiswa di UGM dalam mengatur dan mengelola organisasi mahasiswanya secara baik dan benar. Terlihat masih minimnya peran aktif mahasiswa di UGM untuk ikut berpartisipasi demi mewujudkan tata kelola organisasi mahasiswa di kampusnya agar lebih baik. Kemudian, organisasi mahasiswa pun sangat minim mempublikasikan anggaran dana mereka. Selain itu, masih adanya usaha untuk membangun *monoloyalitas* secara sistematis yang mengakibatkan tidak terciptanya kondisi saling mengawasi (*checks and balances sistem*) antar

organisasi kemahasiswaan yang ada di UGM, sehingga tidak akuntabel. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas seharusnya merupakan tugas dasar sebuah organisasi mahasiswa. Ketiga hal itu pula adalah beberapa prinsip yang ada di dalam *good governance* yang mana hal tersebut selama ini telah diterapkan pada tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) maupun universitas (*good university governance*). Kedepan, dengan diterapkannya *good governance* ini di tata kelola organisasi mahasiswa, maka terwujudlah *good student governance*.

*Good student governance* itu sendiri dapat diartikan sebagai perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang dikhususkan bagi organisasi tingkat kemahasiswaan yang mana dijalankan oleh mahasiswa itu sendiri. Namun, untuk menerapkan hal tersebut haruslah diketahui pula kesanggupan dan implementasi dari organisasi mahasiswa selama ini terkait transparansi, partisipatif dan akuntabilitas, karena hal tersebut merupakan beberapa prinsip dari *good governance*.

Apabila beberapa prinsip di atas selama ini tidak diimplementasikan, maka harus dicari faktor penyebabnya agar kedepan dapat menerapkan *good student governance*. Untuk itu perlulah dibuat ataupun kembali dipertegas penerapan prinsip-prinsip *good student governance* di organisasi mahasiswa UGM. Dengan demikian, mahasiswa dapat belajar bagaimana menjalankan sebuah tatanan pemerintahan yang baik dan kedepan akan diterapkan ketika menjadi pemimpin negeri ini.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan mengulas 3 (tiga) rumusan masalah yaitu **Pertama**, Peran aktif mahasiswa untuk berpartisipasi dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi mahasiswa di UGM. **Kedua**, Organisasi Mahasiswa dalam Menjalankan Transparansi, Akuntabilitas dan Mengakomodir Partisipasi Mahasiswa serta Faktor Pendukung dan Penghambatnya. **Ketiga** Konsep *good student governance* yang baik dan ideal untuk dapat diterapkan pada organisasi mahasiswa di UGM.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian ini mencari data pada seluruh organisasi mahasiswa yang ada di Universitas Gadjah Mada (UGM) yaitu 1 organisasi mahasiswa tingkat Universitas, 18 organisasi mahasiswa tingkat Fakultas dan 1 organisasi mahasiswa Sekolah Vokasi. Subyek penelitian di bagi dua macam yaitu responden dan narasumber. Responden di dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan pimpinan organisasi mahasiswa di UGM. Pimpinan organisasi adalah orang yang memimpin organisasi mahasiswa dalam segi struktural di organisasi mahasiswa. Sedangkan responden mahasiswa adalah setiap mahasiswa Strata-1 dan Diploma yang ada di fakultas dan sekolah vokasi. Responden mahasiswa disini adalah mahasiswa angkatan 2013 dan mahasiswa angkatan 2014. Pemilihan kedua angkatan tersebut dimaksudkan karena sudah berada di kampus selama 1 (satu) tahun dan diharapkan sudah mengetahui keadaan kampus. Narasumber adalah ahli yang mempunyai pemahaman terkait penelitian ini yaitu dosen dan mantan pengurus organisasi mahasiswa.

Pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder didapatkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian data primer didapatkan dengan cara observasi menggunakan alat kuisioner yang dibagikan ke responden mahasiswa secara acak. Responden mahasiswa ini diambil sampelnya dengan jumlah 60 orang mahasiswa per fakultas/sekolah vokasi dengan pembagian 30 orang mahasiswa angkatan 2013 dan 30 orang mahasiswa angkatan 2014. Selain itu juga melakukan wawancara dengan alat pedoman wawancara yang mana subyek penelitiannya adalah responden pimpinan organisasi mahasiswa dan narasumber. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, artinya memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek

dan objek penelitian baik itu dari data sekunder maupun dari data primer.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Peran Aktif Mahasiswa dalam Menjalankan Maupun Mengawasi Organisasi Mahasiswa di UGM

Organisasi mahasiswa atau biasa juga dikenal sebagai organisasi kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.<sup>1</sup> Kemudian menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, menyebutkan bahwa "Organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi".

Demi menjadikannya sebagai wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa, tentunya dibutuhkan peran aktif berupa partisipasi dari mahasiswa dalam menjalankan organisasi mahasiswa itu sendiri. Keterlibatan aktif dalam berpartisipasi, bukan hanya keterlibatan jasmaniah semata. Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu partisipasi sangat penting di dalam membangun suatu kelompok atau organisasi. Begitu pula dengan partisipasi mahasiswa terhadap organisasi mahasiswa. Tentunya keterlibatan mahasiswa disini sangat berguna untuk mencapai tujuan dari organisasi mahasiswa itu sendiri. Partisipasi di dalam hal ini adalah menjalankan atau menjadi anggota organisasi mahasiswa. tidak

<sup>1</sup> Silvia Sukirman, 2004, *Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi*, Pelangi Cendikia, Jakarta, hlm. 6.

<sup>2</sup> Keith Davis, 1962, *Human Relations at Work*, New York, San Francisco, Toronto, London, hlm. 15-19.

hanya sebatas hal tersebut, partisipasi juga dapat dilakukan diluar keanggotaan akan tetapi ikut serta berpartisipasi dalam mengawasi organisasi mahasiswa. Kedua partisipasi tersebut dapat digolongkan dalam partisipasi langsung maupun tidak langsung.

Tingginya partisipasi mahasiswa baik langsung maupun tidak langsung membuat kerja organisasi mahasiswa menjadi lebih optimal. Adanya partisipasi langsung mahasiswa di dalam menjalankan organisasi mahasiswa seperti bergabung menjadi anggota membuat distribusi pekerjaan yang ada di organisasi bisa disalurkan ke setiap anggota. Pekerjaan yang dimaksud adalah seperti yang diamanatkan dalam fungsi dan tujuan organisasi yang dalam hal ini dapat dilihat di program kerja organisasi. Oleh karena itu, dengan banyaknya mahasiswa yang ikut menjalankan organisasi mahasiswa, program kerja yang sudah disusun dapat dijalankan dengan optimal dan sesuai dengan target capaian.<sup>3</sup>

Begitu pula dengan partisipasi mahasiswa dalam mengawasi organisasi mahasiswa. Partisipasi tidak langsung ini lebih ditujukan kepada mahasiswa yang tidak berpartisipasi langsung dalam menjalankan organisasi mahasiswa. Partisipasi mahasiswa dalam melakukan pengawasan ini sebenarnya secara tidak langsung berperan dalam mewujudkan fungsi dan tujuan organisasi mahasiswa itu sendiri. Peran mahasiswa dalam mengawasi diperlukan untuk mengontrol pekerjaan dari organisasi mahasiswa. Pengawasan tersebut bisa dalam lingkup yang luas yaitu mencakup hal yang ada di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi dan program kerja maupun pengawasan secara sempit yaitu hanya mengawasi setiap program kerja yang ada. Keberhasilan program kerja bukan sebatas penilaian dari setiap anggota, akan tetapi dari seluruh mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa yang tidak menjadi anggota penting untuk terlibat,

apalagi organisasi mahasiswa adalah suatu lembaga representasi mahasiswa, sehingga apapun yang dikerjakan oleh organisasi mahasiswa harus bermanfaat untuk seluruh mahasiswa.<sup>4</sup>

Seluruh organisasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berjumlah 20 (dua puluh) organisasi tingkat fakultas/sekolah vokasi yaitu BEM/LEM/Dema/LM dan universitas yaitu BEM KM UGM tentunya memerlukan peran aktif dari mahasiswa dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi demi mengoptimalkan kinerjanya. Akan tetapi, dalam penelitian, ditemukan fakta bahwa tingkat partisipasi mahasiswa dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi mahasiswa sangat rendah. **Pertama**, pada tingkat fakultas/sekolah vokasi dalam menjalankan organisasi, hanya Fakultas Hukum saja yang memiliki mahasiswa yang berpartisipasi tinggi yaitu mahasiswa yang pernah menjadi anggota lebih tinggi dibandingkan tidak pernah menjadi anggota. Sedangkan 18 fakultas/sekolah vokasi lainnya sangat rendah yaitu mahasiswa yang tidak pernah menjadi anggota lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang pernah menjadi anggota.

Terdapat alasan-alasan yang beranekaragam mengapa mahasiswa ingin berpartisipasi menjalankan organisasi mahasiswa tingkat fakultas/sekolah vokasi. Alasan-alasan tersebut yaitu seperti Diminta untuk bantu-bantu; Menambah wawasan; Ingin mencoba; Mencari pengalaman dan pengetahuan; Ingin sibuk; Ingin mempraktikkan teori; Ingin menjadi agen perubahan; Tertarik bidang Departemennya; Ingin melakukan kegiatan kritis; Mengisi *Curriculum Vitae*; Ingin mengetahui dinamika kampus; Panggilan Jiwa; dan Karena tidak ada kerjaan.

Selain itu pula, terdapat alasan-alasan mengapa mahasiswa lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi untuk menjalankan organisasi mahasiswa dengan menjadi anggota. Alasan-alasan tersebut dapat dihimpun menjadi alasan

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Yuris Rezha Kurniawan, tanggal 3 Juni 2016 pukul 16.00 bertempat di Kantor Pusat Kajian Anti Korupsi UGM.

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Tondy DMR, S.TP., tanggal 4 Juni 2016 pukul 15.00 bertempat di Kantor Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

internal mahasiswa dan eksternal mahasiswa. Alasan Internal adalah alasan yang timbul dalam diri mahasiswa itu sendiri yaitu seperti Tidak ada waktu/ mengurus waktu; Tidak Tertarik/ Malas; Telat mendaftar; Tidak suka dengan kerumunan; Tidak suka kebiasaan orang yang ada; Kurang Menantang; Sudah di organisasi lain/ UKM/ HMJ; Ada kerja sampingan; Karena tidak penting; Lebih tertarik kepanitiaan acara; Terlalu menyibukkan; Lebih suka Organisasi regional; Anti sosial; Tidak tertarik dengan Organisasi yang berbau politik; Merasa kurang mampu; Terlalu mengikat; Tidak ada *passion*; Kurang menantang; dan Tidak ada di daftar cita-cita. Sedangkan alasan eksternal mahasiswa adalah alasan mahasiswa memandang organisasi mahasiswa yaitu menganggap organisasi mahasiswa Sarat dengan nuansa politik; Memiliki program yang tidak jelas; dan Karena seperti OSIS SMA;

Walaupun demikian, sesuai data yang diperoleh seluruh fakultas/sekolah vokasi tersebut memiliki kesamaan dalam segi konsistensi mahasiswa untuk terus menjadi anggota. Pada prosesnya, mahasiswa cenderung memilih tidak aktif lagi untuk bergabung dalam organisasi mahasiswa atau dengan kata lain mahasiswa yang sebelumnya tergabung menjadi anggota kemudian keluar dari keanggotaan. Terdapat alasan-alasan tertentu yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu: Pergantian anggota sepihak; Terdapat amanah lain; Jadwal kuliah yang padat; Terdapat kesibukan dengan tugas akademis; Tidak bisa membagi waktu; Lebih tertarik dengan organisasi jurusan; Terlalu *arogant* dan mementingkan diri sendiri; Memberi kesempatan bagi yang lebih muda; Sudah purna atau demisioner; Ingin cepat lulus; dan Lelah mengikuti organisasi mahasiswa.

Selanjutnya, sama halnya dengan partisipasi dalam menjalankan organisasi, partisipasi mahasiswa dalam mengawasi organisasi mahasiswa juga sangat rendah. Sesuai dengan data yang didapat, seluruh mahasiswa di fakultas/sekolah vokasi yang ada di UGM sepertinya tidak tertarik untuk mengambil peran secara tidak langsung demi

mengoptimalkan kinerja organisasi mahasiswanya. Keseluruhan jumlah data baik keanggotaan maupun pengawasan dari mahasiswa terhadap organisasi mahasiswa di seluruh fakultas/sekolah vokasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Jumlah Partisipasi Mahasiswa untuk Menjadi Anggota dan Mengawasi Organisasi Mahasiswa di Seluruh Fakultas/Sekolah Vokasi UGM**

Fakultas	Keanggotaan		Masih Aktif	Mengawasi	
	Tidak	Ya		Tidak	Ya
FIB	50	10	6	47	13
FISIPOL	43	17	10	48	12
Psikologi	40	20	9	43	17
Pertanian	40	20	9	38	22
Teknik	47	13	4	55	5
FEB	42	18	10	39	21
FTP	40	20	6	46	14
FKT	42	18	6	39	21
Hukum	29	31	14	37	23
MIPA	49	11	5	42	18
Peternakan	35	25	6	41	19
Kedokteran	44	16	8	59	1
Filsafat	49	11	6	46	14
Biologi	42	18	1	40	20
Farmasi	45	15	8	42	18
Geografi	33	27	12	41	19
FKG	41	19	11	45	15
FKH	54	6	0	49	11
Sekolah Vokasi	57	3	0	56	4
<b>Jumlah</b>	822	318	131	853	287
<b>Persentase</b>	72%	28%	29%	75%	25%

**Sumber:** Data Olahan Penulis

**Kedua**, pada organisasi tingkat universitas yaitu BEM KM UGM, sesuai dengan data yang diperoleh partisipasi mahasiswa dalam menjalankan organisasi BEM KM UGM sangat rendah atau dengan kata lain mahasiswa yang tidak pernah menjadi anggota lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang pernah menjadi anggota. Sama dengan partisipasi pada tingkat fakultas/sekolah vokasi, terdapat alasan-alasan mengapa mahasiswa ingin berpartisipasi menjalankan BEM KM UGM maupun pula terdapat alasan-alasan mengapa mahasiswa lebih memilih untuk tidak terlibat di



dalam menjalankan BEM KM UGM dengan menjadi pengurus. Alasan-alasan mengapa mahasiswa memilih berpartisipasi menjalankan BEM KM UGM yaitu Ingin mengenal orang dari berbagai fakultas; Menerapkan Jiwa Kepemimpinan; Ingin menambah *link*/ menambah relasi; Melatih *softskill*; dan Tertarik dengan isu nasional.

Selain itu, terdapat alasan internal dan eksternal mahasiswa dimana lebih memilih untuk tidak ikut berpartisipasi untuk menjalankan keorganisasian BEM KM UGM. Alasan internal yaitu Tidak ada waktu/ mengurus waktu; Sudah mengikuti organisasi lain/ UKM; Tidak Tertarik/ Malas; Telat untuk mendaftar; Terlalu membebani; Kegiatan di fakultas padat/ terlalu banyak kegiatan; Ingin berkomitmen pada BEM Fakultas; Kerja sampingan; Tidak sesuai dengan Visi dan Misi; Dianggap tidak terlalu penting; Tidak suka dinamika politik BEM KM; Lebih tertarik kepanitiaan acara; Ingin memulai yang dari yang kecil dahulu; Anti sosial; dan Tidak mengetahui kegiatannya; Alasan eksternal yaitu BEM KM UGM terlalu memihak Universitas; Lingkupnya terlalu besar; Dianggap terlalu “Sok” kritis tetapi menyusahkan; Seleksi BEM KM cukup sulit; Kurang sinergi dengan fakultas; Visi misi kurang jelas; Kontribusi BEM KM kurang terlihat; Kurang publikasi kegiatan; Anggota terlalu banyak; Dirasa tidak ada dampak nyata; Tidak adanya kesatuan dalam satu Universitas; dan BEM KM UGM Tidak masuk akal; Kemudian, konsistensi mahasiswa untuk terus menjadi anggota BEM KM UGM juga sangat rendah. Pada prosesnya, mahasiswa cenderung memilih tidak aktif lagi untuk bergabung dalam BEM KM UGM atau dengan kata lain mahasiswa yang sebelumnya tergabung menjadi anggota kemudian keluar dari keanggotaan. Terdapat alasan-alasan tertentu yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu : fokus organisasi lain; Terlalu banyak member; Tanggung jawab di organisasi lain; Merasa kurang mampu; Sibuk dengan akademis; Kinerja BEM KM kurang terlihat; Tidak punya *passion*; Ternyata tidak sesuai dengan visi dan misi atau Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sama halnya dengan partisipasi dalam menjalankan organisasi, partisipasi mahasiswa dalam mengawasi BEM KM UGM juga sangat rendah. Sesuai dengan data yang didapat, seluruh fakultas/sekolah vokasi yang ada di UGM sepertinya tidak tertarik untuk mengambil peran secara tidak langsung demi mengoptimalkan kinerja BEM KM UGM. Keseluruhan jumlah data baik keanggotaan maupun pengawasan dari mahasiswa terhadap BEM KM UGM di seluruh fakultas/sekolah vokasi

**Tabel 2.**  
**Data Keanggotaan BEM Seluruh Fakultas di UGM**

Seluruh Fakultas/ SV	Keanggotaan		Masih Aktif	Mengawasi	
	Tidak	Ya		Tidak	Ya
<b>JUMLAH</b>	<b>1058</b>	<b>82</b>	<b>31</b>	<b>1062</b>	<b>78</b>
<b>Persentase</b>	<b>93%</b>	<b>7%</b>	<b>21%</b>	<b>93%</b>	<b>7%</b>

**Sumber :** Data Olahan Penulis

Dengan demikian, dari data yang didapatkan dan telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa partisipasi mahasiswa UGM dalam menjalankan maupun mengawasi organisasi mahasiswa baik itu pada tingkat fakultas/sekolah vokasi dan universitas sangat rendah. Hal demikian tentunya harus menjadi perhatian bersama dari berbagai pihak terlebih yang memandang bahwa partisipasi mahasiswa tersebut sangat dibutuhkan demi mengoptimalkan kinerja organisasi mahasiswa demi terwujudnya fungsi dan tujuan organisasi mahasiswa.

## **2. Organisasi Mahasiswa dalam Menjalankan Transparansi, Akuntabilitas dan Mengakomodir Partisipasi Mahasiswa serta Faktor Pendukung dan Penghambatnya**

### **a. Transparansi**

Pada pengertiannya, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Apabila dipahami pengertian tersebut, organisasi mahasiswa yang telah dipercayakan oleh mahasiswa untuk menjalankan bidang eksekutif mahasiswa di dalam hal ini sebagai representatif dan wakil mahasiswa, di dalam pengelolaan keuangannya haruslah memberikan informasi keuangan karena mahasiswa memiliki hak atas informasi tersebut. Kemudian, apabila dianalisis lebih lanjut dapat dikatakan bahwa organisasi mahasiswa adalah termasuk badan publik seperti apa yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yaitu tergolong organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri. Dengan demikian, sesuai dengan organisasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) wajib memberikan informasi publik secara berkala kepada setiap lapisan mahasiswa. Secara berkala sebagaimana dimaksud adalah dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali. Prinsip transparansi ditujukan untuk membangun kepercayaan dan keyakinan serta penting dalam menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat atau antara organisasi mahasiswa dan mahasiswa melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Namun pada penerapannya, organisasi mahasiswa di UGM tidak transparan di dalam hal melaporkan keuangannya. Dapat dilihat dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa mahasiswa di seluruh fakultas/sekolah vokasi bahkan tidak mengetahui anggaran dana yang ada di fakultas/sekolah vokasi maupun anggaran

dana BEM KM UGM setiap tahunnya.

**Tabel 3.**  
**Jumlah mahasiswa yang mengetahui**  
**anggaran dana BEM/LEM**  
**Dema/LM dan BEM KM UGM**

Fakultas	BEM/LEM /Dema/LM		BEM KM UGM	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak
FIB	13	47	0	60
FISIPOL	9	51	2	58
Psikologi	7	53	1	59
Pertanian	14	46	3	57
Teknik	3	57	1	59
FEB	20	40	3	57
FTP	13	47	0	60
FKT	18	42	2	58
Hukum	14	46	1	59
MIPA	13	47	0	60
Peternakan	11	49	0	60
Kedokteran	9	51	1	59
Filsafat	7	53	3	57
Biologi	10	50	0	60
Farmasi	13	47	0	60
Geografi	5	55	0	60
FKG	8	52	0	60
FKH	10	50	1	59
Sekolah Vokasi	4	56	2	58
JUMLAH	201	939	20	1120
Persentase	12%	82%	2%	98%

**Sumber:** Data Olahan Penulis

Terdapat dua hal yang melatarbelakangi keadaan tersebut selain dari fakta organisasi mahasiswa tidak melakukan transparansi keuangannya. Latarbelakang kedua adalah timbul dari mahasiswa itu sendiri, yaitu belum ada suatu kesadaran dan menganggap hal tersebut tidak terlalu penting. Padahal, ada kemungkinan sebenarnya organisasi mahasiswa sudah melakukan transparansi keuangan dengan melakukan publikasi dengan alat-alat yang ada, seharusnya dapat diketahui oleh mahasiswa. Sesuai dengan hasil penelitian, alasan-alasan mengapa mahasiswa tersebut antara lain, Tidak ingin tahu; Tidak mencari tahu; Tidak tertarik; Bukan anggota; Sudah percaya; Tidak

penting; Tidak ingin ikut campur; Nanti disangka ikut campur; Jarang mengikuti rapat; Bukan urusan; Tidak kenal anggota organisasi; Dirasa hanya anggota yang tahu; Kurang memperhatikan; Tidak peduli; Tidak punya kepentingan di dalamnya; dan Dianggap seperti sebuah rahasia.

Terkait regulasi, di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) beberapa organisasi mahasiswa tidak ada secara implisit mewajibkan organisasi yang bersangkutan melakukan transparansi keuangannya kepada mahasiswa. Hanya 4 (empat) organisasi mahasiswa saja yang diketahui di dalam ART nya mengatur secara implisit terkait kewajiban organisasi untuk mentransparansikan keuangannya kepada mahasiswa yaitu LM Filsafat, BEM KM FTP, DEMA KM FISIPOL, dan DEMA KM Fakultas Pertanian dimana hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. LM Filsafat pada Pasal 39 perihal Pertanggung Jawaban Dana, Setiap 1 (satu) semester LM wajib melaporkan keuangan kepada seluruh anggota LM Fakultas Filsafat UGM;
- b. BEM FTP pada Pasal 31, melalui Bendahara Senat Mahasiswa harus memberikan laporan keuangan yang disusun dalam bentuk neraca dan diumumkan secara terbuka minimal satu bulan sekali;
- c. DEMA KM FISIPOL pada Pasal 26 ayat (2) perihal Pelaporan Keuangan, mengatakan bahwa Laporan keuangan akhir tahun KM Fisipol UGM dipertanggungjawabkan dalam Kongres Mahasiswa Fisipol UGM kepada warga masyarakat Fisipol UGM seluruhnya;
- d. DEMA KM Fakultas Pertanian di dalam pada Tata Hubungan dan Tata Kerja Pasal 22 ayat (3), mengatakan bahwa DEMA berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertang-

gungjawaban (LPJ) kepada Musyawarah Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Pertanian.

Selain keempat organisasi mahasiswa tersebut di atas terdapat BEM KM Teknik yang mengatur perihal transparansi keuangan yaitu pada Pasal 51 di dalam ART. Akan tetapi, Transparansi keuangan tersebut lebih kepada pelaporan keuangan dan tidak ditujukan kepada mahasiswa melainkan kepada pihak yang bertanggungjawab terhadap kegiatan yaitu dengan waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah melaksanakan kegiatan. Kemudian, terkait faktor pendukung dan penghambat organisasi mahasiswa di dalam transparansi keuangan yang dikaitkan dengan hasil kuisioner mahasiswa, untuk faktor pendukung sendiri sebenarnya sudah ada beberapa organisasi mahasiswa yang sudah mengatur masalah transparansi keuangan yaitu pada keempat organisasi mahasiswa di atas, namun pada faktanya sesuai dengan hasil kuisioner mahasiswa di ketiga fakultas tersebut yaitu Filsafat, Teknologi Pertanian, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pertanian, mahasiswa tidak mengetahui perihal keuangan organisasi mahasiswa yang ada di fakultasnya. Bahkan BEM KM FTP yang mengatur transparansi keuangan minimal 1 (satu) bulan sekali belum sama sekali menjalankan ketentuan tersebut.

Faktor penghambat kenapa hal tersebut dapat terjadi, sesuai dengan hasil wawancara dengan Ketua BEM KM FTP, Muhammad Ali Faqih, mengatakan bahwa organisasinya sedang sibuk dengan agenda yang lain dan menganggap transparansi keuangan belum terlalu penting. Hal ini tentunya sangat kontraproduktif dengan peraturan yang ada, padahal seharusnya jalannya sebuah organisasi harus mengacu pada peraturan yang ada yaitu AD/ART. Selanjutnya, faktor penghambat transparansi keuangan pada organisasi mahasiswa yang lainnya dapat



dikatakan hampir sama yaitu tidak adanya regulasi atau pengaturan yang mewajibkan organisasinya harus melakukan transparansi keuangan yang di publikasikan ke seluruh mahasiswa walaupun secara kultural transparansi keuangan dilakukan pada evaluasi atau kongres yang diadakan setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun sekali. Pengetahuan akan pentingnya melakukan transparansi keuangan juga menjadi faktor penghambat, karena organisasi mahasiswa tidak memfokuskan hal tersebut di dalam rencana kegiatannya.

#### b. Akuntabilitas

Menurut keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berarti di dalam hal ini terdapat organ pengawas yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atau terdapat sistem pengawasan terhadap jalannya organisasi mahasiswa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Lebih lanjut, Miriam Budiardjo mendefinisikan akuntabilitas sebagai “pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu”. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances* sistem).

Pada lingkup organisasi mahasiswa di UGM organ yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan

atau pertanggungjawaban adalah organisasi mahasiswa yang berperan sebagai lembaga legislatif yaitu seperti Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Senat Mahasiswa, Dewan Mahasiswa (DM) dan Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa (MPM). Beberapa organisasi mahasiswa yang terdapat organ yang memiliki fungsi pengawasan dimana hal tersebut di atur di dalam AD/ART yang mana dalam hal ini terdapat distribusi kekuasaan serta ada pula organisasi mahasiswa yang tidak terdapat organ yang memiliki fungsi pengawasan.

**Tabel 4.**  
**Organisasi Mahasiswa Yang Terdapat Organ Yang Memiliki Fungsi Pengawasan**

ORGANISASI MAHASISWA	ORGAN PENGAWAS
BEM KM UGM	Senat Mahasiswa
Dema KM FISIPOL	MPM
BEM KM Biologi	Senat Mahasiswa
BEM KM FTP	Senat Mahasiswa
BEM FARMASI	Senat Mahasiswa
LEM FKT	DPM
BEM PETERNAKAN	DPM
BEM FK	Senat Mahasiswa
BEM FKH	Senat Mahasiswa
BEM FKG	DPM
BEM KM MIPA	DPM
BEM KM TEKNIK	DM
BEM KM SV	DPM

**Sumber :** Data Olahan Penulis

Selain 13 (tiga belas) organisasi mahasiswa di atas, organisasi mahasiswa sisanya tidak terdapat organ yang memiliki fungsi pengawasan yaitu LEM FIB; LM Psikologi; DEMA Justicia FH; LM FILSAFAT; BEM FEB; BEM Geografi dan DEMA Fakultas Pertanian. Tentunya faktor pendukung akuntabilitas terhadap 13 (tiga belas) organisasi mahasiswa yang terdapat organ yang memiliki fungsi pengawasan adalah diaturnya tugas dan fungsi organ tersebut di dalam peraturan AD/ART.

Kemudian terhadap 7 (tujuh) organisasi mahasiswa yang tidak terdapat organ yang memiliki fungsi pengawasan bukan berarti organisasi mahasiswa tersebut tidak diawasi dalam melakukan tugas dan fungsinya. Akan tetapi, pengawasan tersebut tidaklah di ataur di dalam suatu peraturan misalkan di dalam AD/ART. Pengawasan yang dimaksud lebih berdasarkan culture atau kebiasaan yang ada disetiap organisasi mahasiswa dimana yang dianggap selama ini melakukan pengawasan adalah Dekanat, Forum komunikasi maupun Forum ketua Lembaga. Inilah yang menjadi faktor penghambat dimana pengawasan tersebut bukanlah suatu kewajiban dan tentunya tidak memiliki landasan yang kuat berkaitan dengan fungsi dan tujuan dari pengawasan itu sendiri.

### c. Mengakomodir Partisipasi dan Aspirasi Mahasiswa

Seluruh organisasi mahasiswa di UGM membuka seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam organisasi mahasiswa. walaupun terdapat mekanisme pendaftaran dan penerimaan yang diterapkan oleh masing-masing organisasi mahasiswa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kuantitas dan kualitas dari para mahasiswa yang ikut menjalankan keorganisasian agar tetap berjalan secara efektif dan optimal. Mengakomodir partisipasi ini adalah salah satu fungsi dari organisasi mahasiswa yaitu kaderisasi yang bertujuan memberikan keilmuan keorganisasian kepada mahasiswa. Selanjutnya, organisasi mahasiswa yang merupakan representatif mahasiswa tentunya memiliki tugas menyerap aspirasi mahasiswa. Mengakomodir aspirasi mahasiswa ini juga adalah salah satu fungsi dari organisasi mahasiswa agar menjadikan organisasi mahasiswa yang aspiratif. Terdapat kesamaan cara yang diterapkan oleh organisasi mahasiswa di UGM untuk menyerap aspirasi setiap mahasiswa baik

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, organisasi mahasiswa melakukan cara persuasif dan menanyakan langsung kepada setiap mahasiswa terkait problematika yang sedang dihadapi seperti mengadakan hearing dan diskusi. Cara tidak langsung yaitu lebih menggunakan alat-alat baik itu virtual maupun sosial media.

### 3. Konsep *Good Student Governance* yang Baik dan Ideal untuk dapat Diterapkan pada Organisasi Mahasiswa di UGM

Untuk mengkonsep *good student governance* yang ideal berdasarkan hasil penelitian, peneliti hanya mengkhususkan terkait prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan dari wawancara narasumber terkait konsep ideal yang sesuai dengan penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk penguatan pengaturan didalam Anggaran dasar dan Rumah Tangga (AD/ART) organisasi mahasiswa dalam hal transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang secara limitatif dirasa dapat dijalankan oleh organisasi mahasiswa.

Peneliti akan mengesampingkan perbedaan bentuk dari organisasi kemahasiswaan di UGM seperti adanya BEM, LEM, LM dan DEMA, karena hal ini terkait culture dan histori yang berbeda-beda dari setiap fakultas di UGM yang telah dibangun. Perlu dipahami semua, terkait organisasi eksekutif mahasiswa disini, peneliti mengesampingkan pula wewenang dan tugas eksekutif dalam hal pembagian kekuasaan atau trias politica yang diterapkan oleh negara karena memang tidak bisa dibandingkan antara eksekutif pemerintahan negara dengan eksekutif pemerintahan mahasiswa. Melainkan yang peneliti maksud organisasi mahasiswa disini adalah yang secara legitimasi sebagai perwakilan mahasiswa dan sebagai wadah aspirasi dari para mahasiswa yang kemudian bertugas dalam menjalankan advokasi dan kajian ditiap fakultas disinilah peneliti menyimpulkan "keunikan" dari sebuah organisasi mahasiswa.

Kaitanya dengan hasil penelitian ini untuk menemukan konsep ideal dari *good student*

governance dalam hal transparansi yang mana dimaksud disini adalah perihal keterbukaan dalam hal keuangan, seperti dalam pembahasan nomor dua di atas hanya empat organisasi mahasiswa yang mengatur di dalam peraturannya terkait kewajiban transparansi dana kepada mahasiswa, sedangkan yang lainnya hampir seluruh organisasi mahasiswa di UGM tidak mengatur dan bahkan menerapkan transparansi keuangannya.

Sebagai jawaban atas permasalahan ini peneliti membuat konsep yang ideal yang berkaitan dengan prinsip transparansi dalam good student governance yakni peneliti menyarankan prinsip transparansi untuk dimasukkan didalam AD/ART sebagai suatu asas atau prinsip yang harus dijalankan. Hal ini dibutuhkan suatu instrument atau cara untuk penerapannya. Instrument yang dapat dipakai yakni melalui pemanfaatan media cetak dan teknologi informasi atau elektronik, yang kemudian diharapkan dapat mendorong pertanggungjawaban dan transparansi publik yang semakin baik. Selain itu manfaat dengan adanya transparansi anggaran secara elektronik seperti via media sosial, civitas akademika umumnya dan mahasiswa pada khususnya diharapkan akan lebih aktif untuk berpartisipasi dalam pengawasan keuangan lembaga mahasiswa. Kemudian konsep transparansi tersebut dirumuskan kedalam AD/ART yang kemudian mewajibkan kepada organisasi mahasiswa untuk melaporkan anggaran tersebut melalui pemanfaatan teknologi informasi. Untuk jangka waktu pelaporannya sendiri diserahkan kepada organisasi mahasiswa. Namun peneliti menyarankan agar dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam masa periode pengurusan tiap tahunnya atau dengan menggunakan sistem perkegiatan atau setelah kegiatan dilangsungkan.

Selain diatur di dalam AD/ART untuk meng-efektifkan instrument tersebut diperlukan juga Sumber Daya Manusia (SDM) dari organisasi mahasiswa dalam pencatatan keuangan dan pembuatan pelaporan keuangan. Peningkatan SD ini dapat dilakukan seperti dilakukannya pendidikan kebendaharaan pada organisasi mahasiswa. Untuk

kegiatan ini dapat dilakukan dengan mengikuti training yang bekerjasama dengan ahli dalam bidang pencatatan keuangan, misalkan dengan bekerjasama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.

Kemudian, yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas dalam hal pengawasan, untuk menjawab hal tersebut diperlukan terlebih dahulu pembahasan lebih lanjut terkait porsi pengawasan bagi organisasi mahasiswa, seperti yang peneliti jelaskan sebelumnya "keunikan" dari organisasi mahasiswa. Bahwasanya pada umumnya fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi pada badan legislatif selain fungsi budgeting dan fungsi legislasi dalam sebuah negara, Sedangkan badan legislatif didalam organisasi mahasiswa tidak jauh berbeda dan terdapat fungsi pengawasan. Akan tetapi, selama ini belum efektifnya lembaga pengawasan tersebut karena terkait tugas dan fungsi yang belum baik.

Berdasarkan penelitian, konsep idealnya dari lembaga pengawas ini peneliti merekomendasikanya dalam dua bentuk, dimana peneliti tidak akan mengapus atau menambahkan lembaga, hanya saja peneliti lebih menguatkan tugas, fungsi dan kedudukan dari lembaga pengawas. Bentuk dari lembaga peneliti tersebut antara lain dapat dilakukan secara formal dan informal. Dimana untuk bentuk yang formal tersebut berupa Senat Mahasiswa, DPM, MPM dan DM yang antara lain terdapat didalam BEM KM UGM, DEMA KM Fisipol, BEM KM Biologi, BEM KM FTP, BEM KM Farmasi, LEM FKT, BEM Peternakan, BEM FK, BEM FKH, BEM FKG, BEM KM MIPA, BEM KM Teknik, dan BEM KM SV. Peneliti menyarankan di dalam AD/ART terkait tugas, fungsi dan kedudukan harus ditegaskan bahwa tugas dari lembaga pengawas adalah sebagai instrument pengawasan organisasi eksekutif mahasiswa. Untuk mekanisme pengawasannya sendiri dijalankan dengan mengawasi secara langsung setiap kegiatan, program kerja, termasuk juga fungsi advokasi dan kajian dari organisasi mahasiswa. Dengan instrument yang dapat dilakukan oleh lembaga pengawas ini

yakni, rapat dengan ketua lembaga, rapat dengan kepala departemen, rapat dengan ketua acara, memanfaatkan teknologi untuk menjangkau aspirasi dari mahasiswa serta rapat dengan komisi senat mahasiswa. Selain itu untuk bentuk yang informal yang biasanya dilakukan melalui forum komunikasi (Forkom) terdapat pada LEM FIB, LM Psikologi, DEMA Justicia, DEMA KM Pertanian, LM Filsafat, BEM FEB, BEM Geografi, organisasi di atas ini memakai pola forum komunikasi karena hal ini berkaitan dengan pengawasan langsung kepada ketua organisasi mahasiswa yang dapat dilakukannya oleh ketua lembaga lainnya dan dirasa akan jauh dari sifat politis. Namun, melalui Forkom selama ini belum sepenuhnya tertata rapi tetapi banyak permasalahan yang belum diselesaikan terkait, kedudukan, fungsi dan pola kinerja pengawasan. Maka dari itu peneliti disini memberikan saran didalam AD/ART untuk menegaskan kedudukan, fungsi dan pola kinerja pengawasan yakni antara lain melalui forum komunikasi merupakan forum tertinggi di dalam organisasi mahasiswa yang terdiri dari setiap pimpinan lembaga dengan kedudukan diantara para pimpinan lembaga tersebut setara, namun disini dengan adanya forum komunikasi juga diatur terkait koordinator dimana koordinator ini melekat dengan pimpinan lembaga organisasi mahasiswa. Terkait pengawasan melalui Forkom sendiri tidak hanya pengawasan secara langsung serta tidak hanya berlaku bagi organisasi mahasiswa. Namun juga bagi organisasi mahasiswa yang lain selain eksekutif pada tingkat fakultas. Caranya dapat dilakukan dengan menyampaikan secara langsung kepada para pimpinan lembaga lainnya. Dimana untuk koordinasi ini sifatnya lebih mengedepankan musyawarah yang instrumentnya dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sosial media, yang dapat dilakukan secara insidental atau setidaknya-tidaknya seminggu sekali.

Koordinator disini tidak berwenang untuk mengurus kebijakan dari lembaga mahasiswa yang lain. Namun, tugas dari koordinator ini hanya dalam hal koordinasi terkait urusan dari sinergisitas lembaga ke lembaga lainnya dan dari lembaga ke

dekanat. Salah satu contohnya mencakup keuangan yang diberikan dari dekanat ke lembaga mahasiswa lainnya yang sebelumnya disalurkan kepada Lembaga eksekutif terlebih dahulu dan terkait pertanggung jawaban penggunaan dana dari lembaga yang harus melewati verifikasi dari lembaga eksekutif, kemudian eksekutif meneruskan kepada dekanat. Dimana eksekutif disini dapat menolak juga terkait pertanggungjawaban yang dirasa kurang baik sebelum diberikan kepada dekanat. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup dari koordinasi ini adalah dalam hal penentuan kebijakan yakni antara lain kaitannya dengan pembagian keuangan, pembagian waktu kegiatan yang efektif antar lembaga, dan mensinergikan kegiatan lembaga yang dapat digabungkan sehingga lebih efektif yang dapat dilakukan di musyawarah umum pada awal tahun pengurusan.

Selanjutnya, terkait prinsip partisipasi disini adalah keikutsertaan mahasiswa dalam menjalankan dan mengawasi organisasi mahasiswa. Tentunya dalam hal ini organisasi mahasiswa haruslah partisipatif. Untuk meningkatkan partisipasi tersebut maka peneliti pun membaginya menjadi dua cara yakni segi internal dan eksternal. Segi internal maka diperlukan kesadaran didalam diri mahasiswa yakni terkait kepercayaan mengenai pentingnya menjalankan organisasi mahasiswa, yang mana manfaat dalam berorganisasi dapat memberikan nilai plus softskill yang berguna kelak dikemudian hari. Untuk penyadaran tersebut instrument yang dapat dilakukan adalah melalui pengoptimalan dari kegiatan PPSMB di tiap fakultas maupun universitas dimana dapat diisi dengan materi yang berkaitan organisasi mahasiswa baik dalam segi urgensi maupun manfaatnya. Selain itu organisasi mahasiswa juga harus memperbanyak kegiatan yang berbau akademis yang dapat dilakukan melalui kajian atau diskusi dan dikurangkan atau diminimalisir kegiatan event yang kurang efektif dalam hal ini misalkan organisasi mahasiswa mengadakan acara kesenian sendiri yang dalam hal ini tidak mengoptimalkan sinergisitas antar lembaga, dimana seharusnya event tersebut bisa dilakukan

dengan bekerja sama dengan organisasi mahasiswa yang memang konsen di ranah tersebut. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyadaran, yang dimaksud penyadaran disini adalah bahwasanya mahasiswa mengemban misi yang sangat mulia yakni sebagai *agent of change*.

Sedangkan untuk segi eksternal, perlunya kerjasama dengan dekanat, dimana misalkan dengan melarang kepada dosen untuk mengadakan kuliah pengganti sabtu dan minggu. Sehingga harapannya adanya jeda waktu kuliah sabtu dan minggu dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk memakai waktu tersebut diluar kesibukan akademis. kemudian juga dapat dengan melakukan inovasi kegiatan dengan memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari dekanat kepada mahasiswa yang memang berprestasi dalam bidang non-akademik.

Pada dasarnya untuk mengefektifkan jalannya *good student governance*, hal utama yang harus dicapai sebelumnya adalah terkait Kepercayaan (trust) atas adanya atau pengakuan, baik dalam bentuk sosial maupun politik, adalah sine qua non (syarat mutlak) agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik dan kepercayaan saling membutuhkan satu sama lain, dimana lahirnya kepercayaan akan menumbuhkan tata pemerintahan yang baik. Dimana timbulnya kepercayaan ada kaitannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan yang baik dapat melahirkan kepercayaan sosial dan adanya legitimasi sosial yang kuat yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Jadi selain menjalankan konsep organisasi yang berbasis *good student governance* untuk meningkatkan peran serta mahasiswa dalam organisasi mahasiswa maka juga harus dibarengi dengan membangun kepercayaan yang baik antara mahasiswa terhadap organisasi mahasiswa yang kemudian akan menimbulkan pengakuan. Untuk meningkatkan peran serta tersebut pada dasarnya para mahasiswa yang ikut berperan di dalam organisasi mahasiswa seharusnya dalam berasosiasi lebih mengintenskan hubungan tatap muka dengan mahasiswa secara umum yang mana kemudian memungkinkan orang untuk saling mengenal

satu sama lain baik dalam hal pribadi, maupun juga memungkinkan mereka untuk memperluas perasaan positif yang kemudian berpengaruh juga dalam hal partisipasi, akuntabilitas dan transparansi mahasiswa di organisasi kemahasiswaan.

#### D. Kesimpulan

1. Peran aktif mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) di dalam menjalankan dan mengawasi organisasi mahasiswa di tingkat fakultas/ sekolah vokasi yaitu BEM, LEM, LM dan Dema sangat rendah. Hanya Fakultas Hukum saja yang memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak berpartisipasi. Akan tetapi, pada perkembangannya konsistensi mahasiswa sangat rendah untuk selalu menjalankan keorganisasiannya. Selain itu, partisipasi mahasiswa dalam menjalankan dan mengawasi organisasi mahasiswa pada tingkat universitas yaitu BEM KM UGM juga sangat rendah. Terdapat alasan-alasan yang beranekaragam baik itu alasan internal yang merupakan alasan yang timbul dalam diri mahasiswa itu sendiri dan alasan eksternal yang merupakan alasan mahasiswa memandang organisasi mahasiswa.
2. Pada prinsip Transparansi, Menurut hasil kuisisioner mahasiswa mengatakan bahwa organisasi mahasiswa tidak transparan di dalam hal keuangan, walaupun ada beberapa organisasi mahasiswa yang mengatakan akan dan telah melakukan transparansi keuangan. Faktor pendukung di dalam hal ini adalah terdapat 4 (empat) organisasi mahasiswa yang sebenarnya sudah mengatur kewajiban transparansi keuangan di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah



Tangga (AD/ART) yaitu LM Filsafat, BEM FTP, DEMA KM FISIPOL dan DEMA Fakultas Pertanian. Sedangkan 16 (enam belas) organisasi mahasiswa lainnya di UGM tidak mengatur hal demikian, dan inilah yang menjadi salah satu faktor penghambatnya selain masalah pengetahuan akan pentingnya transparansi. Sementara pada Prinsip Akuntabilitas, terdapat beberapa organisasi mahasiswa yang memiliki sistem pengawasan dan diatur di dalam suatu peraturan AD/ART yaitu dengan adanya organ/lembaga pengawas baik itu DPM, MPM, DM dan Senat Mahasiswa. Organisasi mahasiswa yang memiliki sistem pengawasan adalah BEM KM UGM, Dema KM Fisipol, BEM KM Biologi, BEM KM FTP, BEM FARMASI, LEM FKT, BEM PETERNAKAN, BEMFK, BEMFKH, BEM FKG, BEM KM MIPA, BEM KM Teknik dan BEM KM SV. Inilah yang merupakan faktor pendukung akuntabilitas di setiap organisasi mahasiswa tersebut. Sedangkan yang tidak memiliki sistem pengawasan, bukan berarti di dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi mahasiswa tidak diawasi. Pengawasan tersebut lebih secara culture dan kebiasaan seperti dilakukan oleh Dekanat, Forkom, dan Forum Ketua Lembaga. Inilah yang menjadi faktor penghambat dikarenakan pengawasan tersebut tidak mengikat. Organisasi

mahasiswa yang tidak memiliki sistem pengawasan adalah LEM FIB, LM Psikologi, Dema Justicia FH, Dema KM Fakultas Pertanian dan BEM KM Geografi. Perihal mengakomodasi partisipasi dan aspirasi mahasiswa, keseluruhan organisasi mahasiswa hampir memiliki cara yang sama. Partisipasi di dalam menjalankan organisasi terdapat mekanisme perekrutan untuk menjaga kualitas dan kuantitas. Pengakomodasian aspirasi pula dilakukan oleh setiap organisasi mahasiswa dengan menggunakan alat-alat yang terjangkau dan mudah diakses mahasiswa, sehingga aspirasi dapat tersampaikan.

3. Konsep disini lebih ditekankan kepada penguatan pengaturan dari ketiga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi di dalam AD/ART organisasi mahasiswa. Penguatan tersebut tentunya akan menjadi suatu kewajiban yang harus dijalankan dan tentunya memiliki instrument atau tata cara menjalankannya. Dengan memperkuat pengaturan terhadap ketiga prinsip *good governance* di dalam organisasi mahasiswa dengan kata lain dapat dikatakan sebagai konsep *good student governance*. Selain itu, perlu meningkatkan kepedulian dan kepercayaan mahasiswa agar organisasi mahasiswa di dalam menerapkan *good student governance* menjadi efektif dan optimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam, 1998, *Menggapai Kedaulatan untuk Rakyat*, Mizan, Bandung.  
Davis, Keith, 1962, *Human Relations at Work*, New

York, San Francisco, Toronto, London.  
Sukirman, Silvia, 2004, *Tuntunan Belajar Di Perguruan Tinggi*, Pelangi Cendikia, Jakarta.